

## BAB III PEMBAHASAN

### A. DESKRIPSI DATA

#### 1. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Survey ini mengambil data dari 100 responden yang berasal dari warga Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yaitu khususnya pada desa Panggunharjo, Timbulharjo, Pendowoharjo, dan Bangunharjo. Pada penelitian ini ditujukan kepada masyarakat setempat yang sudah terdaftar pada DPT supaya dapat mengerti dan memahami pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik *Stratified proposional random sampling* agar jawaban yang didapat benar-benar mewakili pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel pertanyaan ini.

Karakteristik responden ini dapat dilihat dari segi komposisi **Jenis Kelamin, Usia Responden, Agama, Tingkat Pendidikan Terakhir**. Semua ditampilkan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dalam bentuk tabel dan diagram.

#### 3.1 Jenis Kelamin

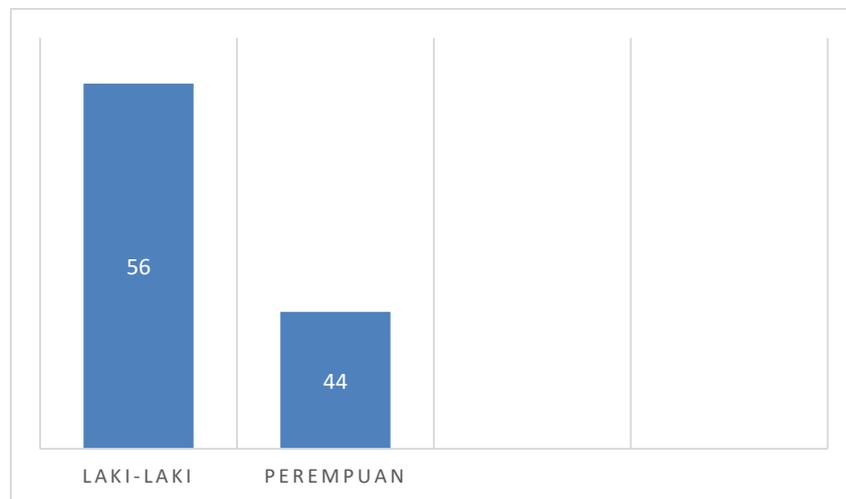
jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
LAKI-LAKI	56	56.0	56.0	56.0
Valid PEREMPUAN	44	44.0	44.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui jumlah presentase jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 56 orang atau presentase 56,0%. Sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 44 orang atau presentase 44,0%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden laki-laki dengan frekuensi sebanyak 56 orang dengan presentase 56,0%.

Jika karakteristik jenis kelamin dapat dilihat melalui diagram maka akan terlihat pada diagram 3.1 sebagai berikut :

**Diagram 3.1. 1Jenis Kelamin**



### 3.2 Usia Responden

**Tabel 3.2 1Usia Responden**

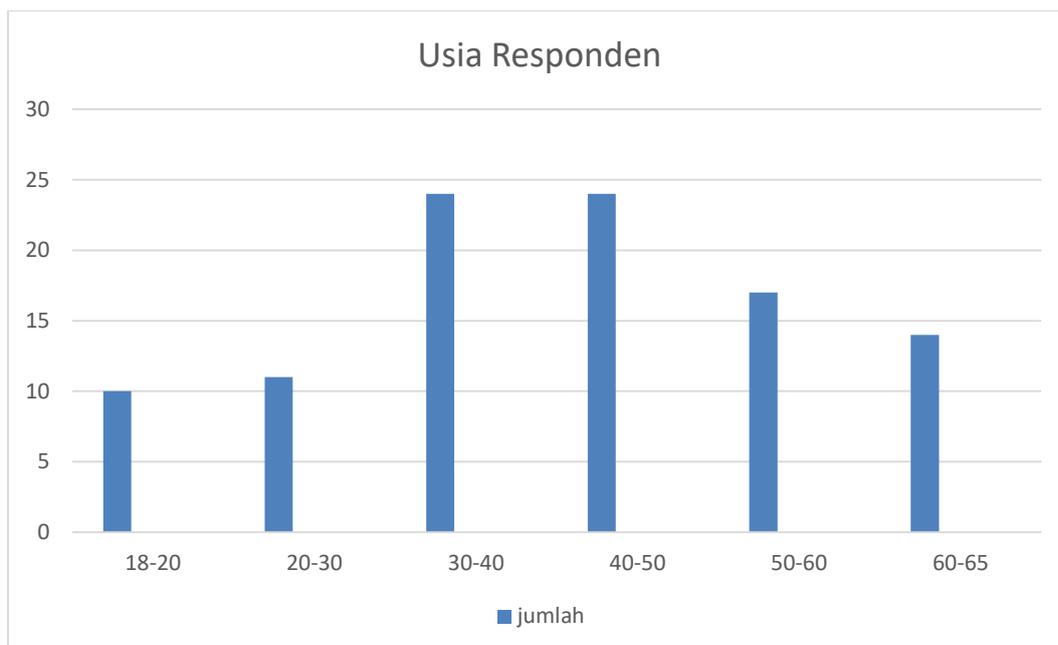
	<i>frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
18-20	10	10,0	10,0	10,0
20-30	11	11,0	11,0	20,0
30-40	24	24,0	24,0	42,7
40-50	24	24,0	24,0	64,0
50-60	17	17,0	17,0	82,7

60-65	14	14,0	14,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Berdasarkan tabel 1.2 maka adapat diketahui jumlah presentase usia responden terbanyak adalah dengan rentan usia 30-40 tahun dengan jumlah 24 orang atau presentase 24,0%. Responden dengan rentan usia 20-30 tahun dengan jumlah 11 orang atau 11,0%, responden dengan rentan usia 40-50 tahun dengan jumlah 24 orang yaitu dengan presentase 24,0%, responden dengan usia 50-60 tahun dengan jumlah 17 orang yaitu mempunyai presentase 17,0%, usia responden dengan rentan 60-65 dengan jumlah 14 orang dengan presentase 14,0%, Sedangkan responden yang paling sedikit dengan usia 18-20 tahun dengan jumlah 10 orang dengan presentase 10,0%.

Berikut adalah karakteristik usia responden apabila dilihat menggunakan diagram 3.2 adalah sebagai berikut :

**Diagram 3.2 1Usia Responden**



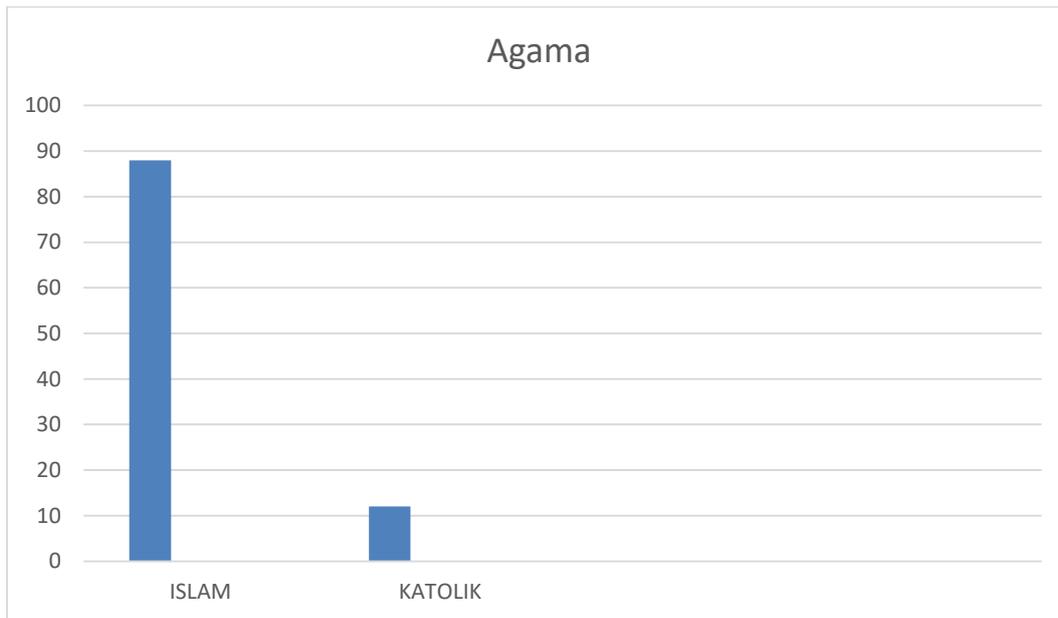
### 3.3 Agama

Tabel 3.3 1Agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ISLAM	88	88.0	88.0	88.0
KATOLIK	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 3.3 diatas jumlah presesntase responden adalah masyoritas beragama Islam dengan jumlah 88 orang dengan presentase 88,0%,sedangkan minoritas responden beragama katolik dengan jumlah 12 orang dengan jumlah presentase 12,0%. Pernyataan tersebut dapat pula dilihat dengan diagram seperti berikut :

Diagram 3.3 1 Agama



### 3.4 Pendidikan Terakhir

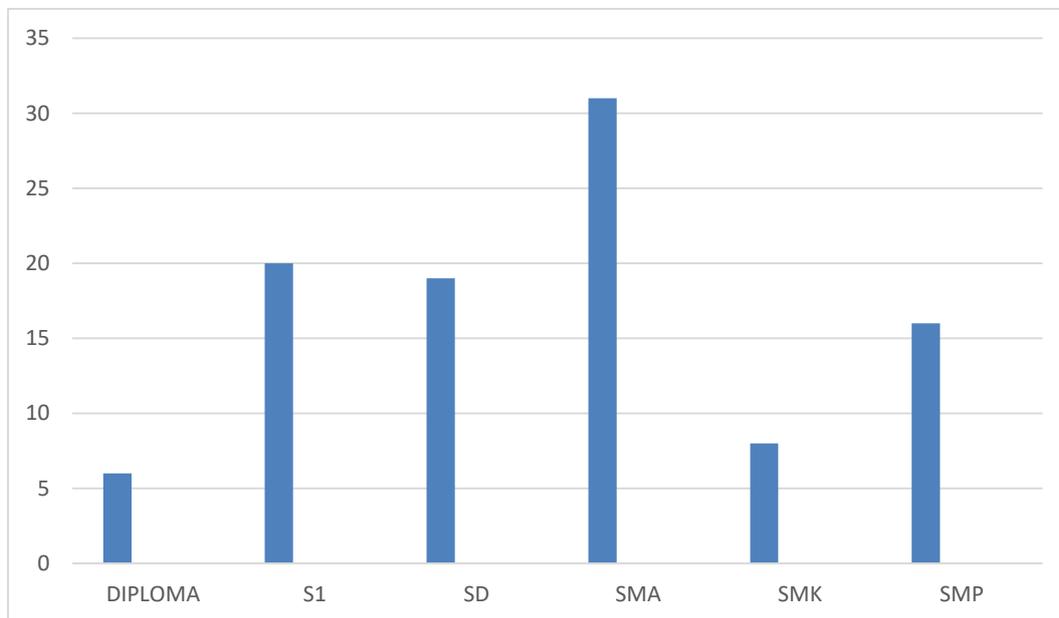
Tabel 3.3 2 Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
DIPLOMA	6	6.0	6.0	6.0
S1	20	20.0	20.0	26.0
SD	19	19.0	19.0	45.0
Valid SMA	31	31.0	31.0	76.0
SMK	8	8.0	8.0	84.0
SMP	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 3.3 pendidikan terakhir terbanyak responden yaitudengan lulusan SMA yang berjumlah 31 orang dengan preentase 31,0%, kemudian diikuti dengan jumlah dan presntasi yang sama yaitu lulusan S1 dan SD dengan masing-masing berjumlah 20 dan 19 orang dan mempunyai prentase 20,0% dan 19,0%, berikutnya lulusan SMP berjumlah 16 orang dengan jumlah presentase 16,0%, dan lulusan SMK dengan jumlah 8 orang dengan presentase 8,0% orang. Sedangkan jumlah paling sedikit yaitu Diploma dengan jumlah 6 orang dengan presentase 6,0%.

Pernyataan tersebut dapat pula dilihat menggunakan diagram sebagai berikut :

**Diagram 3.4 1** Pendidikan Terakhir



## **2. PERSEPSI MASYARAKAT TETANG POLITIK DINASTI**

Persepsi masyarakat adalah suatu proses penilaian seseorang terhadap objek berupa tanggapan/respon yang diberikan oleh masyarakat mengenai persepsi masyarakat tentang politik dinasti dalam ranah politik lokal yang berada di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Indikator dari variabel penelitian ini adalah :

1. Persepsi Masyarakat
  1. Komponen kognitif
  2. Komponen afektif
2. Politik Dinasti dari aspek kognitif (pengetahuan)
  1. Kesesuaian Politik Dinasti dengan Budaya Masyarakat
  2. Politik Dinasti bertentangan dengan demokrasi
  3. Kualitas calon dari Politik Dinasti sama dengan yang tidak Politik Dinasti
  4. Politik Dinasti tidak korupsi
  5. Politik Dinasti cenderung korupsi
  6. Politik Dinasti tidak demokrasi
  7. Politik Dinasti didukung parpol
  8. Kualitas demokrasi dan korupsi

Politik Dinasti dari aspek afektif (perasaan)

9. Politik Dinasti lebih mementingkan kepentingan keluarga
10. Politik Dinasti menghambat calon dari calon masyarakat umum
11. Calon dari Politik Dinasti lebih berkualitas
12. Politik Dinasti lebih cenderung menyalahgunakan kekuasaan
13. Saya tidak setuju dengan Politik Dinasti

Persepsi masyarakat tentang politik dinasti dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Persepsi Masyarakat

### 1. Kesesuaian Politik Dinasti dengan Budaya Masyarakat

Kesesuaian Politik Dinasti di Kecamatan Sewon memiliki kecenderungan setuju dengan adanya Politik Dinasti dan tidak setuju adanya Politik Dinasti. Setuju dengan adanya Politik Dinasti disebabkan dengan latar belakang pendidikan mereka yang kurang menunjang atau mengetahui Politik Dinasti mereka tidak paham betul kemudian mengiyakan atau setuju di daerah mereka terjadi praktik Politik Dinasti. Tidak setuju dengan adanya Politik Dinasti karena mereka sudah paham konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya praktik Politik Dinasti tersebut dan cenderung berdampak negatif. Untuk melihat kesesuaian Politik Dinasti dengan budaya masyarakat di Kecamatan Sewon bisa dilihat pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1 Kesesuaian Politik Dinasti dengan Budaya Masyarakat

No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
1.	Kesesuaian Politik Dinasti dengan Budaya Masyarakat	Sangat Tidak Setuju	1	31	31	31,0
		Tidak Setuju	2	11	44	11,0
		Kurang Setuju	3	17	51	17,0
		Setuju	4	20	80	20,0
		Sangat Setuju	5	21	105	21,0
Jumlah				100	311	100,0
					<b>311</b>	<b>Sangat</b>

				<b>Tidak Setuju</b>
--	--	--	--	---------------------

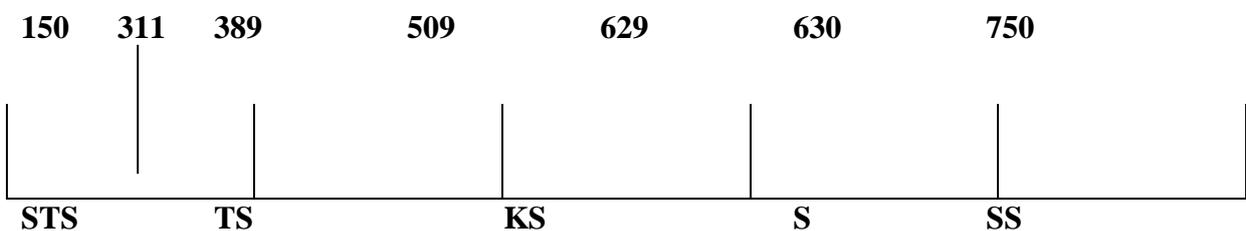
Sumber : data primer 2019

Tabel 3.1.1 menunjukkan bahwa total skor untuk sub variabel kesesuaian Politik Dinasti dengan budaya masyarakat diperoleh 311 dengan kategori tidak setuju. Dari data diatas diperoleh nilai skor yang tinggi yaitu 100 pada indikator sangat setuju. Tinggi skor tersebut disebabkan karena masyarakat tidak paham dengan Politik Dinasti yang sesungguhnya dan tidak tahu konsekuensi yang ditimbulkan.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Zuly Qodir, 2015) menyebutkan bahwa beberapa factor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Salah satunya adalah kesesuaian Politik Dinasti dengan Budaya Masyarakat yang erat kaitannya dengan pluralitas yang diangka dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas mengenai kesesuaian politik dengan budaya masyarakat dapat dilihat pada skala 3.1.1.

**Skala 3.1.1 Skala kesesuaian politik dinasti dengan budaya masyarakat.**



Dari skala diatas dapat dijelaskan bahwa total skor 311, untuk persepsi masyarakat dengan kesesuaian politik dinasti dengan budaya masyarakat berada pada skor (150-389). Dengan kategori sangat tidak setuju. Hal ini didapatkan jawaban responden merasa sangat

tidak setuju karena politik dinasti tidak sesuai dengan budaya masyarakat di Kecamatan Sewon.

## 2. Politik Dinasti Lebih Mementingkan Kepentingan Keluarga

Menurut (Tristana, 2015:2) Politik Dinasti adalah suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu pemerintahan. Rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun temurun atau dilakukan satu keluarga atau kerabat dekat. Dinasti politik juga dapat diartikan sebagai strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihak keluarga mereka dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Untuk melihat Politik Dinasti lebih mementingkan keluarga dapat dilihat dari tabel 3.1.2 berikut :

**Tabel 3.1.2 Politik Dinasti Lebih Mementingkan Kepentingan Keluarga**

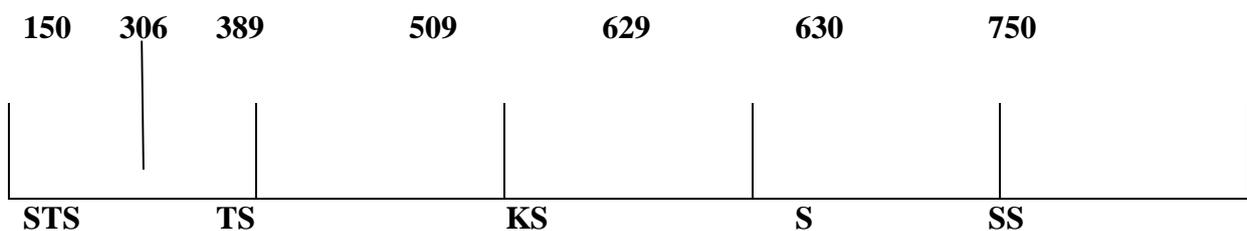
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
2.	Politik Dinasti Lebih Mementingkan Kepentingan Keluarga	Sangat Tidak Setuju	1	13	13	13,0
		Tidak Setuju	2	17	34	17,0
		Kurang Setuju	3	31	93	31,0
		Setuju	4	29	116	29,0

	Sangat Setuju	5	10	50	10,0
Jumlah			100	306	100,0
<b>TOTAL</b>				<b>306</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Tabel 3.1.2 menunjukkan bahwa total skor untuk sub variabel Politik Dinasti lebih mementingkan keluarga diperoleh 306 skor dengan kategori sangat tidak setuju. Dari data diatas diperoleh skor sangat tinggi yaitu 116 skor pada indikator setuju. Tinggi skor tersebut disebabkan karena masyarakat setuju dengan adanya keluarga Politik Dinasti lebih cenderung mementingkan kepentingan keuarganya. Untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas mengenai Politik Dinasti lebih mementingkan kepentingan keluarga dapat dilihat pada skala 3.1.2.

### Skala 3.1.2 Politik Dinasti Lebih Mementingkan Kepentingan Keluarga



Dari skala diatas dapat dijelaskan bahwa total skor 306, untuk Politik Dinasti lebih mementingkan kepentingan keluarga dengan rentan skor (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Hal ini didapatkan karena masyarakat memahami Politik Dinasti secara umum lebih mementingkan kepentingan keluarga.

### 3. Politik Dinasti Menghambat Calon dari Masyarakat Umum

Sesuai dengan yang dinyatakan (Riza, AH 2011) bahwa politik dinasti juga bisa merusak kaderisasi partai politik, dengan kata lain politik dinasti menutup kemungkinan bagi calon baru untuk menggantikan atau mencalonkan menjadi Kepala Daerah bisa terhambat karena adanya praktik Politik Dinasti tersebut. Untuk menjelaskan pendapat tersebut dapat dijelaskan pada tabel 3.1.3 berikut :

**Tabel 3.1.3 Politik Dinasti Menghambat Calon dari Masyarakat Umum**

No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
3.	Politik Dinasti Menghambat Calon dari Masyarakat Umum	Sangat Tidak Setuju	1	18	18	18,0
		Tidak Setuju	2	18	36	18,0
		Kurang Setuju	3	27	81	27,0
		Setuju	4	34	136	34,0
		Sangat setuju	5	3	15	3,0

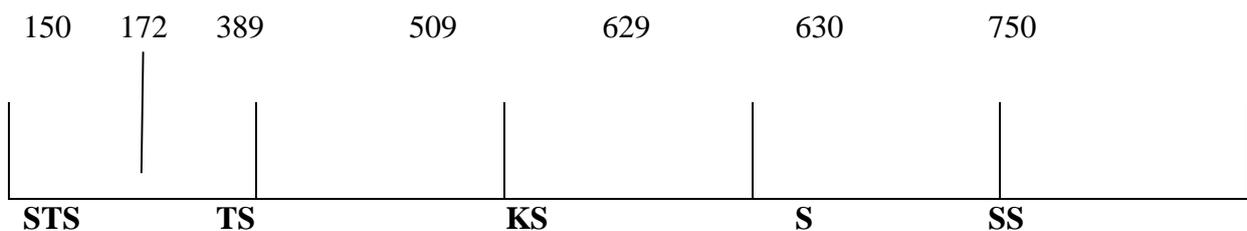
Jumlah		100	172	100,0
<b>TOTAL</b>			<b>172</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Dari tabel 3.1.3 dapat dijelaskan bahwa total skor untuk sub variabel Politik Dinasti menghambat calon dari masyarakat umum 172 dengan kategori sangat tidak setuju. Dari skor diatas terdapat skor yang sangat tinggi yaitu 81 skor dengan kategori setuju. Tinggi skor tersebut dapat disebabkan karena menurut hampir semua masyarakat di Kecamatan Sewon mengetahui Politik Dinasti menghambat calon dari masyarakat umum.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dengan skala 3.1.3 berikut :

### Skala 3.1.2 Politik Dinasti Menghambat Calon dari Masyarakat Umum



Skala diatas dapat menjelaskan total skor 172, untuk Politik Dinasti menghambat calon dari masyarakat umum berada pada skor rentan (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Data tersebut sesuai dengan secara umum pendapat masyarakat karena Politik Dinasti memang benar menghambat calon dari masyarakat umum atau masyarakat biasa bukan dari kalangan keluarga Politik Dinasti.

#### 4. Calon dari Politik Dinasti Lebih Berkualitas

Kualitas kandidat calon dari Politik Dinasti itu sendiri lebih tidak diketahui karena karena kualitas kandidat tersebut dilihat dari segi keturunan bukan dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Dari data ya dianalisis dari kandidat dinasti dan non-politik dinasti menyatakan bahwa Politik Dinasti lebih memiliki kecenderungan kemenangan yang lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa calon politisi dari Politik Dinasti hanya memudahkan melaju dan meraup suara dalam pemilu walaupun dalam realitasnya kandidat tersebut cenderung tidak mempunyai kompetensi yang cukup dalam bidang politik dan pemerintahan. Tabel 3.1.4 tersebut dapat menjadi acuan data bagi peneliti.

**Tabel 3.1.4 Calon dari Politik Dinasti Lebih Berkualitas**

No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase
4.	Calon dari Politik Dinasti Lebih Berkualitas	Sangat Tidak Setuju	1	8	8	16,0
		Tidak Setuju	2	18	36	18,0
		Kurang Setuju	3	35	81	35,0
		Setuju	4	27	108	27,0
		Sangat Setuju	5	12	60	12,0

Jumlah		100	293	100,0
<b>TOTAL</b>			<b>293</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Dari tabel 3.1.4 dapat dijelaskan dengan sub variabel calon dari Politik Dinasti lebih berkualitas 293 skor dengan kategori sangat tidak setuju. Dari skor diatas terdapat skor tertinggi yaitu 108 skor dengan kategori kurang setuju. Pernyataan tersebut sesuai dengan masyarakat sewon yang memiliki pendapat sanat tidak setuju atau kurang setuju karena calon dari politik dinasti belum tentu berkualitas sesuai yang di inginkan oleh masyarakat sewon.

Untuk memiliki gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada skala 3.1.4 sebagai berikut :

### Skala 3.1.4 Calon dari Politik Dinasti Lebih Berkualitas



Skala diatas dapat menjelaskan total skor 293, untuk calon dari Politik Dinasti lebih berkualitas berada pada skor rentan (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju hal tersebut sesuai dengan pendapat masyarakat sewon yang sebagian masyarkat berpedapat bahwa calon Politik Dinasti tidak lebih berkualitas dari kandidat non-politik dinasti.

## 5. Politik Dinasti Cenderung Menyalahgunakan Kekuasaan

Memang benar Politik Dinasti cenderung menyalahgunakan kekuasaan karena peluang ini dapat dimanfaatkan para *incumbent*, pengusaha dan segelintir elit politik yang dekat dengan kekuasaan. Ketiganya memiliki peluang besar dalam memenangkan Pilkada karena memiliki modal baik material dukungan politik dan kekuasaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.5.

**Tabel 3.1.5 Politik Dinasti Cenderung Menyalahgunakan Kekuasaan**

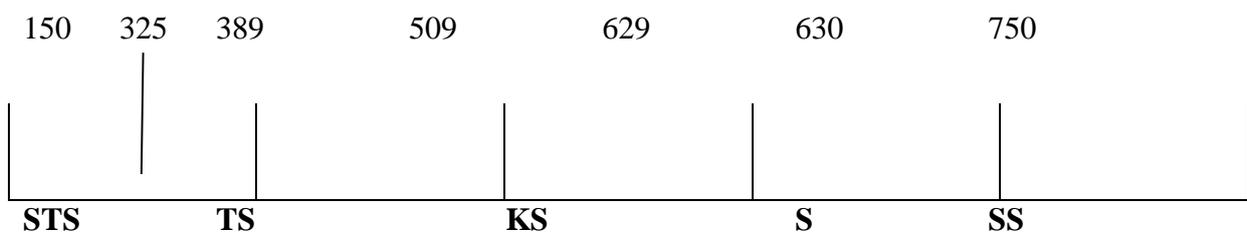
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
5.	Politik Dinasti Cenderung Menyalahgunakan Kekuasaan	Sangat Tidak Setuju	1	16	16	16,0
		Tidak Setuju	2	8	16	8,0
		Kurang Setuju	3	22	66	22,0
		Setuju	4	43	172	43,0
		Sangat Setuju	5	11	55	11,0
Jumlah				100	325	100,0

<b>Total</b>		<b>325</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>
--------------	--	------------	----------------------------

*Sumber : data primer 2019*

Dari tabel 3.1.5 dapat dijelaskan dengan sub variabel Politik Dinasti cenderung menyalahgunakan kekuasaan total skor 325 dengan kategori sangat tidak setuju. Dari skor diatas terdapat skor tertinggi yaitu 172 drngan kategori setuju. Hal ini disebabkan karena masyarakat kecenderungan setuju dengan adanya Politik Dinasti ini cenderung menyalahgunakan kekuasaan. hal tersebut dapat dijelaskan pula pada skala 3.1.5 berikut :

### **Skala 3.1.5 Politik Dinasti Cenderung Menyalahgunakan Kekuasaan**



Skala diatas dapat menjelaskan skor 325, untuk Politik Dinasti cenderung menyalahgunakan kekuasaan berada pada rentang skor (150-389), dengan kategori sangat tidak setuju. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat masyarakat di Kecamatan Sewon yang sangat tidak setuju apabila terjadi praktik Politik Dinasti karena Politik Dinasti ini cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

### **6. Saya Tidak Setuju dengan Politik Dinasti**

Politik Dinasti menurut saya mempunyaidampak yang negatif bagi bagi perkembangan politik di Indonesia. Hal tersebut yang membuat saya tidak setuju apabila Politik Dinasti akan marak berkembang di Indonesia. Tidak menuntut kemungkinan pernyataan tersebut dari berita-berita yang berkembang banyak kasus politik yang

ditimbulkan dengan adanya praktik Politik Dinasti. Untuk melihat data yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.1.6.

**Tabel 3.1.6 Saya Tidak Setuju dengan Politik Dinasti**

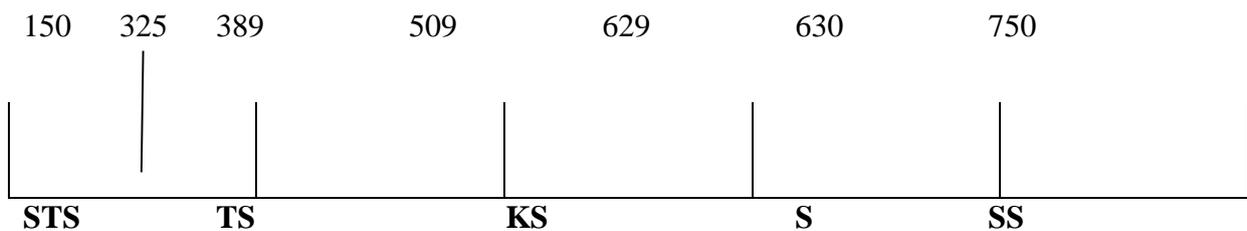
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presntase (%)
6.	Nilai-nilai yang dianut	Sangat Tidak Setuju	1	13	13	13,0
		Tidak Setuju	2	8	16	8,0
		Kurang Setuju	3	31	93	31,0
		Setuju	4	37	148	37,0
		Sangat Setuju	5	11	55	11,0

Jumlah		100	325	100,0
<b>TOTAL</b>			<b>325</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

*Sumber : data primer 2019*

Dari tabel 3.1.6 di atas dengan sub variabel saya tidak setuju dengan politik dinasti dengan total skor 325 masuk pada kategori sangat tidak setuju. Dari skor di atas terdapat skor tertinggi yaitu 148 skor dengan kategori setuju. Hal tersebut terjadi karena saya sendiri merasa sangat tidak setuju adanya politik dinasti dan setuju apabila politik dinasti ini tidak ada di Indonesia. Untuk melihat lebih jelasnya dapat dilihat pada skala 3.1.6 berikut :

### **Skala 3.1.6 Saya Tidak Setuju dengan Adanya Politik Dinasti**



Skala di atas dapat dijelaskan bahwa pada skor 245, untuk saya tidak setuju dengan Politik Dinasti pada rentan skor (150-389), dengan kategori sangat tidak setuju. Hal ini tentunya sesuai dengan pendapat sewon yang sangat tidak setuju dengan adanya politik dinasti terjadi di Indonesia tentu karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan melainkan dampak positif yang didapatkan.

## **7. Politik Dinasti Bertentangan dengan Demokrasi**

Politik Dinasti ini dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik Dinasti lebih identic dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari Ayah

kepada anak atau istrinya atau sodara yang lain yang masih dalam lingkup keluarga. Hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel 3.1.7

**Tabel 3.1.7 Politik Dinasti Bertentangan dengan Demokrasi**

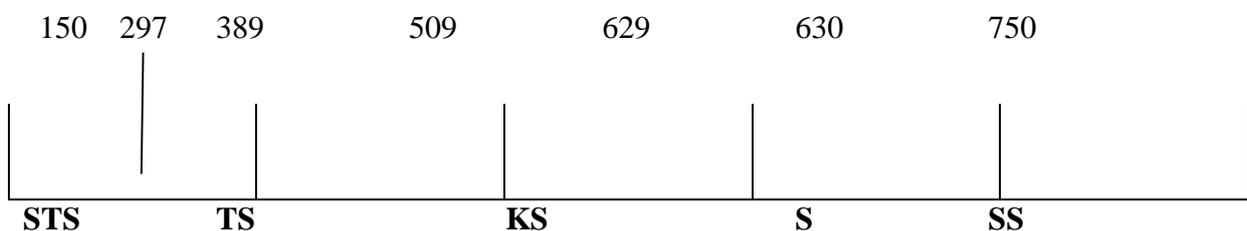
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
7.	Politik Dinasti Bertentangan dengan Demokrasi	Sangat Tidak Setuju	1	16	16	16,0
		Tidak Setuju	2	19	38	19,0
		Kurang Setuju	3	28	84	28,0

	Setuju	4	26	104	26,0
	Sangat Setuju	5	11	55	11,0
Jumlah			100	297	100,0
<b>TOTAL</b>				<b>297</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Tabel 3.1.7 diatas dengan sub variabel Politik Dinasti bertentangan dengan demokrasi terdapat total skor 297 dengan keterangan kategori sangat tidak setuju. Dari skor diatas terdapat skor tertinggi yaitu 104 skor dengan kategori setuju. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat masyarakat yang setuju apabila praktik Politik Dinasti ini tidak sesuai dengan demokrasi yang ada di Indonsesia terutama bagi masyarakat di Kecamatan Sewon. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan pada skala 3.1.7 berikut :

### Skal 3.1.7 Politik Dinasti Tidak Sesuai dengan Demokrasi



Skala diatas dapat dijelaskan bahwa pada skor 297, untuk Politik Dinasti bertentangan dengan demokrasi berada pada rentan (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan jawaban responden masyarakat sewon yang sangat tidak setuju dengan adanya Politik Dinasti karena dirasa tidak demokrasi.

## 8. Politik Dinasti Tidak Korupsi

Dalam beberapa fakta yang terjadi dilapangan memang adanya Politik Dinasti yang bersih dan lebih tepatnya tidak melakukan praktik korupsi. Tetapi hal tersebut sedikit sekali karean Politik Dinasti ini lebih cenderung melakukan penyimpangan kekuasaan atau korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.8.

**Tabel 3.1.8 Politik Dinasti Tidak Korupsi**

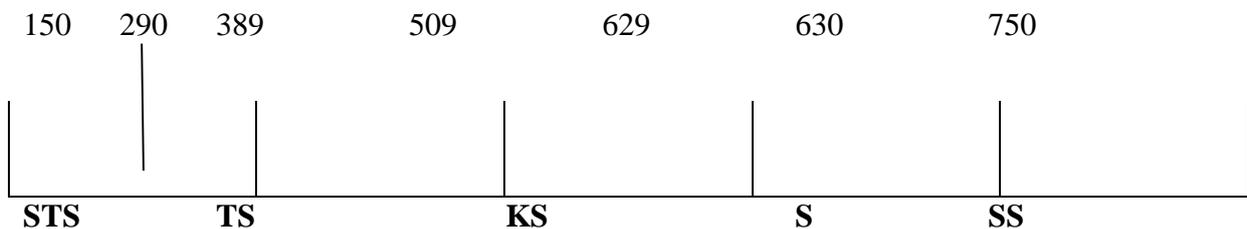
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
8.	Politik Dinasti Tidak Korupsi	Sangat Tidak Setuju	1	15	15	15,0
		Tidak Setuju	2	21	42	21,0
		Kurang Setuju	3	32	96	32,0
		Setuju	4	23	92	23,0

	Sangat Setuju	5	9	45	9,0
Jumlah			100	290	100,0
<b>Total</b>				<b>290</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

*sumber : data primer 2019*

dari tabel 3.1.8 diatas dengan sub variabel Politik Dinasti tidak korupsi terdapat total skor 290 dengan kategori setuju. Terdapat nilai tertinggi 96 dengan kategori kurang setuju. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat merasa kurang setuju dengan pernyataan Politik Dinasti tidak korupsi karena masyarakat merasa Politik Dinasti Cenderung korupsi. Ini juga dapat dijelaskan pada skala 3.1.8.

### **Skala 3.1.8 Politik Dinasti Tidak Korupsi**



Skala diatas dapat dijelaskan bahwa pada skor 290, untuk Politik Dinasti tidak korupsi beradap pada rentan (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan masyarakat yang sangat tidka setuju dengan pernyataan Politik Dinasti tidak korupsi.

### **9. Kualitas Calon dari Politik Dinasti Sama dengan yang Tidak Politik Dinasti**

Kualitas calon dari Politik Dinasti lebih diunggulkan dari pada kandidat calon dari non-Politik Dinasti. Hal ini disebabkan karena kandidat dari Politik Dinasti sudah unggul nama popularitas kandidat keluarganya sebelumnya ehingga dengan mudah dapat meraup suara yang lebih banyak dari kandidat non-Politik Dinasti. Tetapi apabila berbicara kualitas

calon politik dinasti belum tentu mempunyai kualitas yang mumpuni untuk dijadikan sebagai Kepala Daerah Karena masuk dunia politik hanya karena mengandalkan nama keluarganya. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel 3.1.9.

**Tabel 3.1.9 Kualitas Calon dari Politik Dinasti Sama dengan yang Tidak Politik Dinasti**

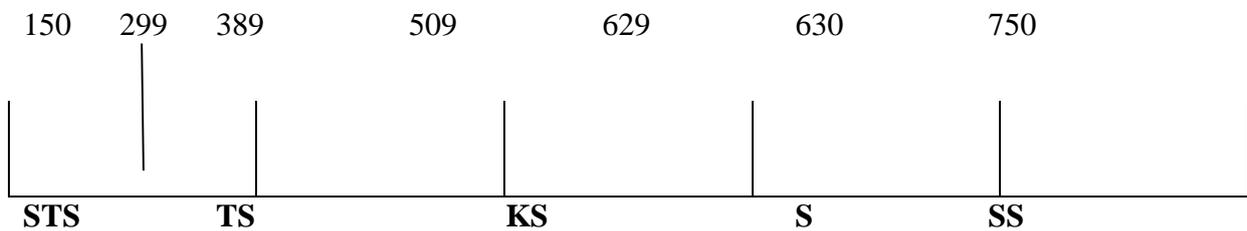
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
9.	Nilai – nilai yang berkembang	Sangat Tidak Setuju	1	22	22	2,0
		Tidak Setuju	2	9	18	9,0
		Kurang Setuju	3	23	69	23,0
		Setuju	4	40	160	40,0
		Sangat	5	6	30	6,0

	Setuju			
Jumlah		100	299	100,0
<b>TOTAL</b>			<b>299</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Tabel 3.1.9 diatas dengan sub variabel kualitas calon Politik Dinasti sama dengan yang Tidak Politik Dinasti terdapat total skor 299 dengan kategori sangat tidak setuju. Terjapat juga nilai tertinggi dari data diatas yaitu 160 skor dengan kategori setuju. Hal tersebut sesuai dengan jawaban masyarakat yang setuju apabila kandidat dari Politik Dinasti belum tentu lebih berkualitas dari kandidat non-Politik Dinasti. Pernyataan ini dapat juga dilihat pada skala 3.1.9.

### Skala 3.1.9 Kualitas Calon dari Politik Dinasti Sama dengan yang Tidak Politik Dinasti



Skala 3.1.9 diatas dapat dijelaskan bahwa pada skor 299, untuk kualitas calon dari Politik Dinasti sama dengan yang tidak Politik Dinasti berada pada reantan skor (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden yang sangat tidak setuju apabila kualitas calon politik dinasti lebih baik dari non-politik dinasti/

## 10. Politik Dinasti Cenderung Korupsi

Data Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, tahun 2010 ada 206 Kepala Daerah yang terasngkut kasus hukum. Tahun selanjutnya Kemendagri mencatat secara rutin yaitu 40 Kepala Daerah (tahun 2011), 41 Kepala Daerah (2012), dan 23 Kepala

Daerah (2013). Berdasarkan pantauan ICW sebanyak 183 Kepala Daerah menjadi tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Bupati yang menjadi tersangka kasus korupsi mencapai angka 110, walikota 34 orang, wakil bupati sebanyak 16 orang, gubernur 14 orang, wakil walikota berjumlah 7 orang, dan wakil gubenur sebanyak 2 orang. Kemendagri juga mencatat 77 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT), dan 300 lebh kepala daerah terkena masalah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1.1

**Tabel 3.1.10 Politik Dinasti Cenderung Korupsi**

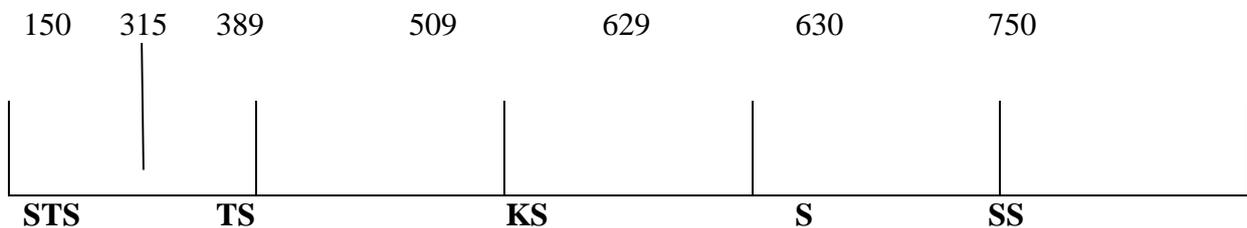
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
10.	Politik Dinasti Cenderung Korupsi	Sangat Tidak Setuju	1	14	14	14,0
		Tidak Setuju	2	11	22	11,0
		Kurang Setuju	3	33	99	23,0

	Setuju	4	30	120	30,0
	Sangat Setuju	5	12	60	12,0
Jumlah			100	315	100,0
<b>TOTAL</b>				<b>315</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Tabel 3.1.10 diatas dengan sub variabel Politik Dinasti cenderung korupsi terdapat tota skor 315 dengan kategori sangat tidak setuju. Terdapat juga tertinggi yaitu 120 dengan kategori setuju. Dengan pernyataan demikian masyarakat menyadari bahwa setuju dengan apa yang sudah ada yaitu praktik Politik Dinasti ini cenderung menyimpang dari praktik politik yang bersih atau korupsi. Untuk melihat lebih jelsa dapat dijelaskan pada skala 3.1.10.

### Skal 3.1.10 Politik Dinasti Cenderung Korupsi



Skala 3.1.10 diatas menunjukkan bahwa total skor 315, pada Politik Dinasti cenderung korupsi berada pada rentan skor (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Pernyataan berikut sesuai dengan masyarakat di Kecamatan Sewon karena sangat tidak setuju adanya politik Dinasti sebab Politik Dinasti sendiri cenderung korupsi.

### 11. Politik Dinasti Tidak Demokrasi

Dalam pemahaman dasar adanya akses atau partisipasi masyarakat untuk memilih secara langsung pada sistem Pilkada mengindikasikan kulaitas demokrasi lebih baik. Masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasinya mengingat adanya demokrasi ini

masyarakat bisa langsung mengutarakan sesuai apa yang diinginkan. Tetapi adanya kemunculan Politik Dinasti ini tentunya masyarakat menjadi teracac kenyanannya untuk menyuarakan anspirasinya dan seakan mereka hanya melakukan politik ikut-ikutan sama dengan yang lain karena enggan berdebat yang lebih panjang. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel 3.1.11.

**Tabel 3.1.11 Politik Dinasti Tidak Demokrasi**

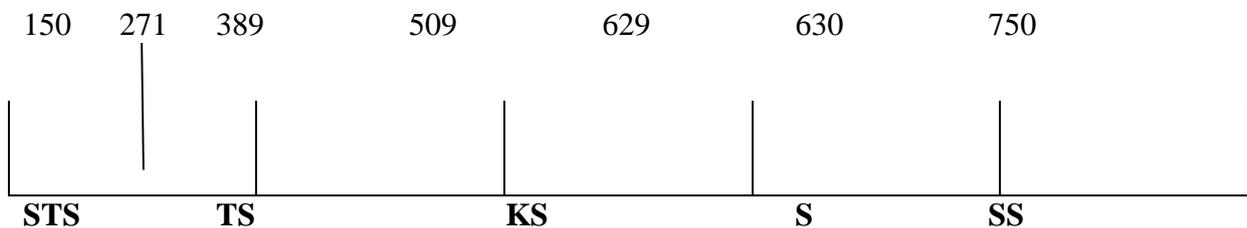
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
11.	Politik Dinasti Tidak Demokratis	Sangat Tidak Setuju	1	29	29	29,0
		Tidak Setuju	2	15	30	15,0
		Kurang Setuju	3	24	72	24,0

	Setuju	4	20	80	20,0
	Sangat Setuju	5	12	60	12,0
Jumlah			100	271	100,0
<b>Total</b>				<b>271</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Tabel 3.1.11 diatas dengan sub variabel Politik Dinasti tidak demokratis dengan total skor 271 dengan kategori sangat tidak setuju. Nilai tertinggi pada tabel diatas adalah 80 dengan kategori kurang setuju. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan masyarakat yang merasa kurang setuju adanya Politik Dinasti karena tida demokrasi. Ini juga dapat dijelaskan pada skala 3.1.11.

### Skala 3.1.11 Politik Dinasti Tidak Demokratis



Skala 3.1.11 diatas menunjukkan bahwa total skor 219, pada Politik Dinasti tidak demokratis berada pada rentan skor (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Pernyataan tersebut sesuai dengan respon narasumber masyarakat, karena sangat tidak setuju dengan adanya Politik Dinasti yang menyebabkan politik tidak demokratis.

## 2. Politik Dinasti

### 1. Politik Dinasti Didukung Parpol

Rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam Pilkada juga mudah mengakomodasi politik kekerabatan. Selain untuk memenangkan *political offices* selain menyandarkan pada

tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar pada parpol, juga semakin menggiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berketetapan karena aturan pembatasan masa jabatan. Dalam hal ini maka ikatan kekerabatan dengan para *incumbent* atau tokoh sentral parpol jelasa saja membuat nepotisme dan favoritisme semakin menonjol. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel 3.2.1

**Tabel 3.2.1 Politik Dinasti Didukung Parpol**

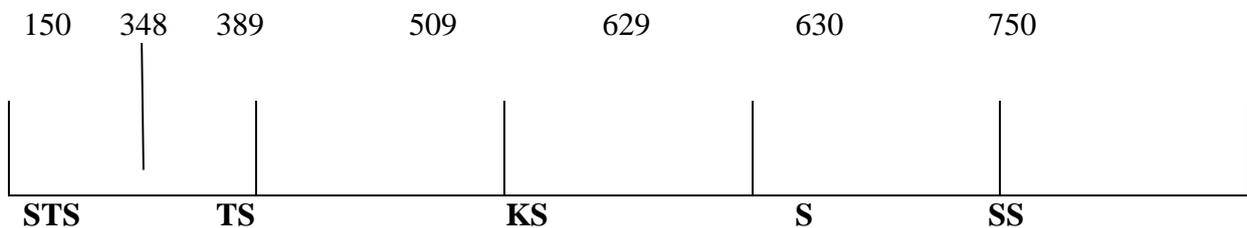
No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
12.	Politik Dinasti Didukung Parpol	Sangat Tidak Setuju	1	12	12	12,0
		Tidak Setuju	2	13	26	13,0
		Kurang Setuju	3	37	111	37,0

	Setuju	4	31	164	31,0
	Sangat Setuju	5	7	35	7,0
<b>Jumlah</b>			100	348	100,0
<b>Total</b>				<b>348</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

Sumber : data primer 2019

Tabel 3.2.1 diatas dengan sub variabel Politik Dinasti didukung parpol dengan total skor 348 dengan kategori sangat tidak setuju, dan terdapat nilai tertinggi yaitu 164 skor yang masuk pada kategori setuju. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pada tabel diatas masyarakat Sewon setuju apabila Politik Dinasti ini adanya dukungan yang kuat dari parpol tertentu. Hal ini juga dapat dilihat pada skala 3.2.1.

### Skal 3.2.1 Politik Dinasti Didukung Parpol



Skala 3.2.1 diatas menunjukkan bahwa total skor 348, pada Politik Dinasti didukung parpol berada pada rentan skor (150-389) dengan indikator sangat tidak setuju. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan masyarakat sangat tidak setuju karena seharusnya parpol lebih mendukung kandidat dari calon *independent* bukan dari Politik Dinasti.

## 2. Politik Dinasti Kualitas Demokrasi Di Indonesia

Trend baru yang muncul jadi sebagian orang menganggap wajar hal tersebut muncul, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya menuntut transparansi dari semua proses politik tertekan oleh Politik

Dinasti. Oleh karena itu kemunculan Politik Dinasti dianggap membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel 3.2.2.

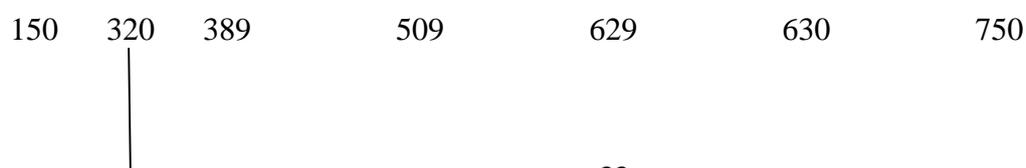
**Tabel 3.2.2 Politik Dinasti dengan Kualitas Demokrasi**

No	Indikator	Kategori Jawaban	Nilai Skor	Frekuensi (orang)	Total	Presentase (%)
13.	Politik Dinasti dengan Kualitas Demokrasi	Sangat Tidak Setuju	1	14	14	14,0
		Tidak Setuju	2	12	24	12,0
		Kurang Setuju	3	31	93	31,0
		Setuju	4	26	104	26,0
		Sangat Setuju	5	17	85	17,0
<b>JUMLAH</b>				<b>100</b>	<b>320</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>320</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>

*Sumber : data primer 2019*

Tabel 3.2.2 diatas menjelaskan bahwa sub variabel Politik Dinasti dengan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan total skor 320 kategori sangat tidak setuju, dan terdapat nilai tertinggi dengan 104 skor kategori setuju. Hal ini diperoleh peneliti dari narasumber masyarakat apabila mereka setuju dengan adanya politik dinasti mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga dapat dilihat pada skala 3.2.2.

**Skal 3.2.2 Politik Dinasti dengan Kualitas Demokrasi**





Skala 3.2.2 diatas menunjukkan bahwa total skor 320, pada Politik Dinasti dengan Kualitas Demokrasi berada pada rentan skor (150-389) dengan kategori sangat tidak setuju. Hal tersebut tetntunya juga sesuai dengan pernyataan masyarakat Sewon yang sangat tidak setuju dengan adanya Politik Dinasti karena bisa mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.

### 3. TOTAL PERSEPSI SECARA KESELURUHAN

Setuju dengan Politik Dinasti : masyarakat enggan menggali lebih jauh figur kandidat yang maju sebagai calon kepala daerah.

Tidak setuju dengan Politik Dinasti : masyarakat telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari Politik Dinasti lebih banyak yang merugikan bagi masyarakat, selain rentan dengan adanya praktik korupsi melainkan juga Politik Petahana sendiri telah menyimpang dari alur sistem demokrasi.

Penilaian masyarakat di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terhadap persepsi secara keseluruhandapat dilihat pada tabel 3.3.1.

**Tabel 3.3.1 1hasil rekapitulasi penilaian masyarakat tentang politik dinasti di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.**

NO	VARIABEL	Sub Variabel	Nilai	Keterangan
----	----------	--------------	-------	------------

1.	Persepsi Masyarakat	1. Kesesuaian Politik Dinasti dengan Budaya Masyarakat	311	Sangat Setuju	Tidak
		2. Politik Dinasti Lebih Mementingkan Kepentingan Keluarga	306	Sangat Setuju	Tidak
		3. Politik Dinasti menghambat calon dari calon dari masyarakat umum	172	Sangat Setuju	Tidak
		4. Calon dari Politik Dinasti Lebih Berkualitas			
		5. Politik Dinasti Cenderung Menyalahgunakan Kekuasaan	293	Sangat Setuju	Tidak
		6. Saya Tidak Setuju dengan Politik Dinasti	325	Sangat Setuju	Tidak
		7. Politik Dinasti Bertentangan dengan Demokrasi		Sangat Setuju	Tidak
		8. Politik Dinasti tidak Korupsi	325		
		9. Kualitas Calon dari Politik Dinasti Sama dengan yang Tidak Politik Dinasti	297	Sangat Setuju	Tidak
		10. Politik Dinasti Cenderung Korupsi	290	Sangat Setuju	Tidak
		11. Politik Dinasti			

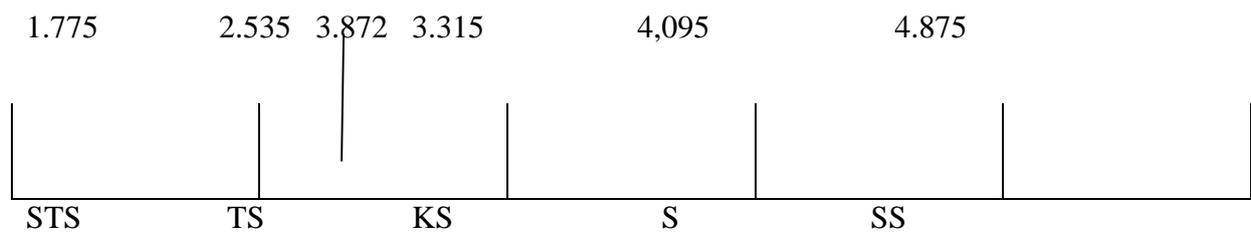
		Tidak Demokrasi	299		
			315	Sangat Setuju	Tidak Setuju
			271	Sangat Setuju	Tidak Setuju
2.	Politik Dinasti	12. Politik Dinasti di dukung Parpol	348	Sangat Setuju	Tidak Setuju
		13. kualitas demokrasi dan korupsi	320	Sangat Setuju	Tidak Setuju
<b>Jumlah</b>			<b>3.872</b>	<b>Tidak Setuju</b>	

*Sumber : data primer 2019*

Tabel 3.3.1 menunjukkan bahwa hasil penilaian responden terhadap persepsi secara keseluruhan adalah tidak setuju dengan total bobot 3.030. Penilaian tersebut sesuai indikator persepsi masyarakat meliputi latar belakang budaya dengan bobot 4617, pengalaman masa lalu 790, nilai-nilai yang dianut 912, berita-berita yang berkembang 885, dan indikator politik dinasti meliputi kekuatan jaringan dan modal 348, kualitas demokrasi dan korupsi 320.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 3.3.1.

### Skala 3.3.1. 1Skala Rekapitulasi



Keterangan : STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Gambar 3.3.1 menunjukkan bahwa jumlah skor sebanyak 3.872 untuk persepsi masyarakat secara keseluruhan skor (2.535 - 3.315) termasuk kategori tidak setuju. Hal ini bahwa responden merasa tidak setuju dengan adanya politik dinasti didaerah mereka politik dinasti tersebut selain tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat sewon juga menyimpang dari demokrasi yang ada di Indonesia. Sesuai dengan yang masyarakat alami pengalaman masalah, nilai-nilai yang dianut, dan berita-berita yang berkembang menunjukkan bahwa sesuai dengan diketerangan yaitu sebagian masyarakat measa sangat setuju karena masyarakat benar-benar mengalaminya. Sub variabel politik dinasti dengan katergori kekuatan jaringan dan modal maupun kualitas demokrasi dan korupsi menunjukkan keterangan tidak setuju hal ini disebabkan kareana kekuatan jarinagn dan moda maupun kualitas demokrasi dan korupsi sangat mempengaruhi akibat adanya politik dinasti.

